

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Sejak beberapa tahun silam, Indonesia menyadari besarnya ancaman kedaulatan di wilayah perbatasan, terutama di perbatasan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan batas wilayah negara tetangga. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk merundingkan batas wilayahnya dengan negara tetangga untuk mencapai kesepakatan tanpa merusak hubungan kedua negara. Indonesia juga aktif dalam forum ASEAN untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami negara di kawasan yang berdampak pada tidak stabilnya keamanan regional.

Satu diantara permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan mengganggu stabilitas keamanan kawasan adalah sengketa wilayah di Laut China Selatan. Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang tidak terlibat sengketa karena jarak negara cukup jauh dari wilayah sengketa, namun batas wilayah Indonesia cukup dekat dengan Laut China Selatan dimana sengketa wilayah banyak terjadi hingga ke Pulau Spratly, menyebabkan stabilitas keamanan di kawasan terancam. Namun pada akhirnya Indonesia terkena dampak klaim Tiongkok yang mengklaim 90% wilayah Laut China Selatan merupakan wilayah kekuasaan Tiongkok berdasarkan peta kuno Armada Laut Tiongkok. Kapal nelayan Tiongkok juga beberapa kali terdeteksi memasuki wilayah Perairan Natuna dan melakukan *illegal fishing* bahkan dikawal kapal patroli Tiongkok. Pada akhirnya beberapa kapal nelayan Tiongkok yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin ditangkap dan ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia.

Pada Maret 2016, kapal nelayan Tiongkok yang dikawal oleh kapal patroli penjaga Tiongkok kembali ditangkap oleh Angkatan Laut Indonesia. Tiongkok tidak menerima perlakuan Indonesia dan memprotes keras

tindakan Indonesia. Tiongkok mengatakan bahwa Indonesia telah melanggar hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dan DoC Laut China Selatan. Tiongkok juga mengklaim bahwa Indonesia telah menyalahgunakan fungsi militernya untuk menyerang warga sipil. Padahal Indonesia telah menindak kapal nelayan Tiongkok sesuai hukum yang berlaku, dan militer Indonesia tidak melukai warga sipil yang merupakan nelayan Tiongkok. Hal ini menyebabkan merenggangnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Dalam hal ini, Indonesia mengalami kerugian domestik dan regional karena kepercayaan negara lain dapat luntur terhadap Indonesia atas insiden ini. Namun Indonesia tetap mempertahankan wilayah kedaulatannya dan berusaha menjalin hubungan baik dengan Tiongkok.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang terkena dampak ancaman dari tindakan Tiongkok, namun negara-negara lainnya di sekitar Laut China Selatan juga terkena dampak, terutama Vietnam dan Filipina dimana Tiongkok membangun pangkalan militer udara dekat dengan batas wilayah Filipina dan beberapa kali memasuki wilayah Filipina tanpa koordinasi serta membangun kilang minyak di ZEE milik Vietnam. Pada tahun 2014, Filipina bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk melawan Tiongkok dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya yang sering dimasuki kapal Tiongkok tanpa koordinasi, bahkan Filipina memberikan wilayah untuk Amerika Serikat membangun pangkalan militernya. Keterlibatan Amerika Serikat pada akhirnya meresahkan Tiongkok dan semakin mengancam stabilitas keamanan kawasan. Kapal Patroli Amerika Serikat dengan senjata lengkap bahkan pernah memasuki wilayah Kepulauan Spratly dekat dengan pangkalan militer udara yang dibangun Tiongkok.

Sejak tahun 2014, tepatnya pasca pergantian Presiden RI pada bulan Oktober, kebijakan pertahanan Indonesia berubah mengutamakan pencapaian Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Dalam hal ini, prinsip *zero enemy* yang sebelumnya dianut tidak terlalu jelas terlihat karena kepentingan utama Indonesia adalah menjadi negara kuat sehingga pertahanan negara ditingkatkan secara efisien. Sedangkan masalah Laut

China Selatan merupakan masalah yang tidak melibatkan Indonesia secara langsung dan bersifat abstrak karena penyelesaiannya harus dengan merelakan wilayah Kepulauan Spratly sebagai wilayah lepas yang penggunaannya diatur dalam hukum internasional. Namun hal tersebut tidak mungkin dilakukan melihat sikap Tiongkok yang agresif.

Forum kerjasama ASEAN yang digelar lebih banyak membicarakan permasalahan ekonomi dan pengembangan pembangunan negara-negara anggota ASEAN yang merupakan isu yang lebih penting daripada isu seabstrak sengketa Laut China Selatan. Untuk pembahasan masalah pertahanan pun diutamakan upaya penyelesaian isu kejahatan transnasional yang merupakan isu keamanan internasional. Indonesia hanya menyelesaikan masalah klaim terhadap wilayah teritorialnya dengan upaya diplomasi secara bilateral dengan Tiongkok, namun Indonesia juga bekerjasama dengan Tiongkok dalam bidang pertahanan dan pembangunan di Natuna.

Upaya diplomasi Indonesia menurun sejak tahun 2014 karena Indonesia ingin membatasi diri sesuai prinsip non-intervensi di ASEAN sehingga Indonesia dapat mengurangi ancaman kedaulatannya dan menghargai kedaulatan negara lain. Indonesia mengutamakan kerjasama dalam penanganan isu kejahatan transnasional seperti terorisme, kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, pengungsi dan perdagangan narkoba. Selain itu, Indonesia meningkatkan keamanan perbatasan termasuk Kepulauan Natuna melalui peningkatan pertahanan alutsista dari dalam negeri. Sikap Indonesia terkesan plin-plan menghadapi Tiongkok, di satu sisi Indonesia tidak ingin kedaulatan wilayahnya diganggu, di sisi lain Indonesia tidak ingin hubungannya dengan Tiongkok merenggang karena berdampak pada kerugian di berbagai sektor.

IV.2 Saran Penelitian

Indonesia merupakan negara yang mendukung perdamaian dunia, sehingga kontribusi Indonesia dalam membantu meredakan konflik yang mengancam stabilitas keamanan kawasan dapat menjadi dukungan dari negara tetangga terhadap Indonesia serta meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap Indonesia, sehingga diharapkan Indonesia dapat:

- Aktif kembali dalam kontribusinya melalui diplomasi pertahanan. Meningkatkan pertahanan dari dalam merupakan suatu keharusan bagi negara, namun aktif berkontribusi dalam forum regional dan kerjasama Internasional merupakan pilihan sesuai prioritas yang berdampak sangat besar, sehingga lebih baik jika Indonesia dapat menyeimbangkan peningkatan diplomasi pertahanannya dengan peningkatan pertahanannya.
- Seperti sebelumnya, sikap Indonesia dalam mendorong perdamaian di Laut China Selatan mendapat banyak apresiasi dari negara-negara lainnya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap Indonesia dalam mengadakan hubungan kerjasama.
- Indonesia merupakan negara berkembang yang besar dan memiliki banyak mitra strategis dalam berbagai bidang hubungan kerjasama karena politik bebas aktif yang dianutnya sejak merdeka, sehingga Indonesia dapat berpengaruh besar untuk menggerakkan perdamaian di Laut China Selatan.
- Indonesia harus dapat bersikap tegas terhadap klaim Tiongkok, meskipun Indonesia memiliki kepentingan di sektor lainnya. Namun tindakan tegas Indonesia dapat menjadi penggentaran bagi Tiongkok agar tidak bertindak diluar batas hukum yang berlaku.